



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 September 2019/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIT KERJA : INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
SUB UNIT KERJA : BIRO AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, PERENCANAAN, DAN KERJASAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MULYADI
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN KERJASAMA
3. NHK : 677783

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 192.000.000

1. Tanah Seluas 465 m2 di BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 38.000.000
2. Tanah Seluas 865 m2 di BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
3. Tanah Seluas 485 m2 di BOYOLALI, WARISAN Rp. 39.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 550 m2/170 m2 di BOYOLALI, WARISAN Rp. 45.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 33.000.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
2. MOTOR, HONDA ASTREA Tahun 1990, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
3. MOTOR, HONDA SPESY Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
4. MOBIL, DAIHATSU ESPASS Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 12.700.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 365.516.643

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 603.216.643



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 603.216.643

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **4 November 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.